

THE CHARACTERISTICS OF INHABITANTS PALU RIVERS FLOOD BASIN

Pudji Astutiek Fachruddin

Staf Pengajar Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur – Universitas Tadulako

Abstract

The Aims of the study was to analysis the impact of urban economic activities, socioeconomic conditions and sociocultural of migrants on the development of housing in the Palu Rivers flood Basin.

The Data were obtained through quistionare, interview, observation , and documentation. The number of sample was 15 % of 150 respondents. The Method of Analysis used in the study was descriptive – qualitative.

The Result of the study indicate that socioeconomic activities have an effect on the characteristic of the inhabitants. This is indicate by 82 % of the respondents come to Palu to find a job and 47,67 % live in the working location, and 24,66 % live around it. The Relationship between the people who come from the same village residing in the area is 57,33 %. The specific characteristic of the residents found in the location is they work in informal sector of town. Therefore it is recommended to the government to make a policy to organize the housing in the area based on environmental law, the organized the housing the area based on the characteristic of the inhabitants, anf the free area about 50 metre – 100 metre from the housing, so that it can be used as a flood barrier and for reforestation.

Keywords: *Palu Rivers, Inhabitants, Characteristics*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kawasan perkotaan dengan kelengkapan fasilitas dan kegiatan perekonomian kota dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat pedesaan untuk bermigrasi ke kota. Adanya migrasi tersebut tentu mempunyai motivasi tersendiri dan salah satu diantaranya adalah mencari lapangan pekerjaan. Ber mukimnya sejumlah penduduk dalam kota ber konsekwensi pada penyediaan perumahan dalam kawasan perkotaan dan tidak semudah mendapatkannya seperti daerah asal migran tersebut. Pembangunan perumahan illegal dikawasan pusat kota diakibatkan tingginya harga lahan yang ada sehingga dalam beberapa lokasi pusat kota tumbuh lingkungan perumahan secara illegal.

Permasalahan perkotaan yang terkait dengan perumahan ilegal yang terdapat dalam pusat kota dapat terjadi karena

disebabkan karena kondisi yang tidak seimbangnya pengaturan perumahan dan pertumbuhan penduduk kota di setiap saat dapat berubah. Gejala tersebut umumnya terjadi pada daerah bantaran sungai dimana saat ini walaupun sudah diatasi oleh pemerintah dengan pengadaan rumah susun ataupun penataan perumahan masih tetap bermunculan rumah-rumah liar disekitarnya. Meningkatnya pemukim illegal maka akan ditunjang dengan faktor sosial budaya yang dimiliki warga masyarakat yang ada di lingkungan pemukiman tersebut.

Selain itu pekerjaan sektor informal akan berbanding lurus dengan pertumbuhan dan perkembangan lingkungan perumahan yang ada dikawasan pusat kota

Masyarakat migran yang ada di perkotaan berpindah dari desa ke kota dan dapat mengalami perubahan sosial ekonomi

akan tetapi perubahan sosial budaya terkadang sulit untuk terjadi, khususnya budaya desa yang biasanya masih tetap mereka gunakan baik ditinjau dari keakrabannya untuk memanggil keluarganya menekuni pekerjaan yang sama sehingga menambah rumah tinggal yang ilegal lagi dan disamping itu budaya desa yang mengakibatkan pertumbuhan lingkungan perumahan yang kumuh. selain masalah tersebut juga dapat mengurangi aksesibilitas di daerah perkotaan, khususnya pergerakan penduduk yang bermukim di daerah bantaran sungai. Konsekwensi berkurangnya aksesibilitas tersebut maka permasalahan masyarakat kota khususnya yang terkait dengan perencanaan lingkungan dan kebijakan perkotaan (Koester, 1995).

Pada tahap penelitian awal dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya yaitu yang terbentuk oleh beberapa Faktor diantaranya (a) lokasi yang strategis yang berdekatan dengan fasilitas dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam jangkauan pejalan kaki, sirkulasi, dan transportasi kota (b) lokasi strategis yang dekat dengan pusat perdagangan dalam kota (c) Kemampuan pemukim (Astutiek, 2001).

Di Kota Palu khususnya di kelurahan Besusu Barat, kelurahan Tatura Selatan, dan Kelurahan Ujuna mempunyai tingkat kepadatan penduduk migran yang berbeda. Demikian pula spesifikasi budaya kaum migran terdapat beberapa perbedaan bila ditinjau dari budaya masing-masing. Masyarakat di lokasi tersebut diatas mempunyai budaya etnis yang berbeda yaitu :

- a. Di kelurahan Besusu Barat dihuni sebagian besar masyarakat etnis Kaili yang secara kronologis menjadi tuan tanah pada daerah sekitar tetapi dalam kenyataan tergusur ke arah belakang dekat dengan pinggiran sungai sehingga bangunan rumah tinggalnya ke arah belakang jalan utama dan aktivitasnya

banyak berorientasi dengan kegiatan perdagangan di kota Palu.

- b. Pada kelurahan Ujuna dihuni oleh kebanyakan masyarakat etnis bugis Makassar dan suku jawa yang dapat diprosentasikan suku bugis makassar diperkirakan sebesar 80 % sedangkan suku jawa 20 % yang bermukim di kelurahan tersebut yang khususnya berada di daerah pinggiran sungai.
- c. Pada kelurahan Tatura Selatan sebagian besar dihuni oleh etnis Toraja (hasil pengamatan lapangan 2001).

Untuk hal tersebut diatas mempunyai daya tarik tersendiri untuk pengamatan bertambahnya rumah tinggal di daerah sekitar akan disebabkan etnis tersebut mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dilihat dari sisi sosial ekonomi dan sosial budaya yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka isu pokok dalam penelitian ini adalah bahwa Fasilitas ekonomi perkotaan dan karakteristik migran yang ada menjadi daya tarik untuk bermukim disekitar daerah bantaran sungai.

RUMUSAN MASALAH

Perkembangan kota Palu saat ini sangat pesat dengan tumbuh kembangnya lingkungan permukiman yang terencana maupun yang tidak terencana dimana yang terencana kemungkinan bisa tertatur dan lingkungannya akan mudah dan nyaman dinikmati akan tetapi hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memiliki rumah tinggal tersebut. Bagi rumah tinggal yang tidak terencana dan cenderung menjadi kumuh juga akan terlihat di kawasan pusat kota karena hal ini juga pasti terjadi bagi masyarakat yang datang di kota Palu dengan dalih mencari lapangan pekerjaan dan tidak mempunyai banyak dana untuk mencari lahan karena mahalnya lahan yang ada di kawasan pusat kota maka mereka akan mengisi lahan

perkotaan secara illegal oleh karena itu maka masalah yang dapat diangkat adalah :

- a. Apakah Fasilitas Ekonomi kota merupakan faktor pendorong pertumbuhan lingkungan perumahan di daerah bantaran sungai Palu
- b. Bagaimana kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi pemukim yang merupakan penyebab pertumbuhan lingkungan perumahan di daerah bantaran sungai Palu

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh kegiatan fasilitas kota terhadap pertumbuhan lingkungan perumahan yang ada di daerah bantaran sungai Palu
2. menganalisis karakteristik dan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi pemukim sebagai penyebab pertumbuhan lingkungan perumahan di daerah bantaran sungai Palu

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perumahan dan Lingkungannya

Perumahan sebagai suatu struktur fisik disebut sebagai suatu tempat tinggal atau kediaman yang arti kecilnya dapat berupa suatu tempat tinggal / tenda, gua, rumah, mobil atau apartemen yang pada dasarnya adalah suatu rumah yang terlihat sebagai suatu struktur yang melindungi penghuni dari elemen – elemen yang menyediakan secara tersendiri, mempertinggi status dan prestise (laquian dalam mahmud, 1998). adapun yang dimaksud dengan membangun rumah atau perumahan termasuk pula membangun baru, pemugaran, dan memperluas rumah haud dengan mempertimbangkan faktor setempat, berupa keadaan fisik . ekonomi, sosial dan budaya serta keterjangkauan baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Mewujudkan lingkungan perumahan yang layak maka pembangunannya harus mengikuti beberapa persyaratan yaitu :

1. Persyaratan Teknis, ekologis dan administratif dan wajib melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dimana persyaratan teknis berkaitan dengan keselamatan dan keamanan bangunan.
2. persyaratan ekologis berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan baik antara lingkungan buatan maupun dengan lingkungan sisal budaya.
3. persyaratan administrasi berkaitan dengan pemberian izin lokasi dan izin mendirikan bangunan rumah.

Pemantauan lingkungan dengan tujuan untuk mengetahui dampak negative yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan, sedangkan pengelolaan lingkungan bertujuan untuk dapat mengambil tindakan koreksi bila terjadi dampak negatif. Rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkatan dampak yang timbul sesuai dengan peraturan yag berlaku (penjelasan Undang-undang nomor 4 tahun 1992 pasal 7). Untuk menangani masalah perumahan ada beberapa strategi pendekatan yang dilaksanakan oleh beberapa Negara berkembang yaitu :

- a) Pendekatan “ *Laissez – Faire* ”
Pendekatan ini menganut system bebas dimana kaum urban mencari sendiri penyelesaian perumahan mereka dalam kegiatan pemukiman liar dan tanah yang kumuh.
- b) Pendekatan “ *Instutional Frame* ”
Kesadaran pemerintah membawa pihak swasta membangun perumahan dengan bantuan fasilitas Pemerintah.
- c) Pendekatan “ *Partial* ”
Pemerintah terlibat dalam penyediaan perumahan maupun dana bantuan
- d) Pendekatan “ *Total Action* ”
Pendekatan ini merupakan program membangun secara besar-besaran baik

secara horizontal maupun secara vertikal lalu dipersewakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perumahan merupakan suatu kebutuhan hidup bagi masyarakat umum dan khusus yang mana pembangunannya diharapkan dapat terkoordinasi dengan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Pertumbuhan penduduk dan Urbanisasi

Proses Urbanisasi secara sederhana diartikan lebih mengarah pada konsep perpindahan penduduk masuk ke kota dalam arti yang luas Stranatel (1992) mendefinisikan urbanisasi sebagai berikut :

“ a broad process of economic and sosial transformation reflected in transfer of population from rural to urban areas, “ level to Urbanization “ refer to the proportion of the nation population that resides in areas there are designated as urban “

(Suatu proses yang luas dari transformasi ekonomi dan sosial direfleksikan dalam perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, “ Tingkat Urbanisasi” menghantar pada proporsi penduduk suatu Negara yang menempati daerah –daerah yang terbentuk sebagai perkotaan).

Urbanisasi dapat diberi pengertian yaitu masyarakat desa yang mengalir menuju ke kota yang lebih besar dengan sasaran untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih layak, sehingga urbanisasi secara garis besar dapat dikatakan bahwa merupakan pemusatan atau berkumpulnya penduduk kota (Astutiek, 2001).

Dampak dari kebijakan makro seperti kurang berhasilnya ekonomi kerakyatan dipedesaan akan memicu tingginya urbanisasi (Maarif, Sunyoto Usman, 1990)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka akan terjadi :

1. sulitnya mencari pekerjaan dan rendahnya tingkat upah dipedesaan
2. yang lebih besar dimana secara teoritis akan memberikan dampak menyempitnya lahan pertanian di pedesaan.
3. rendahnya jenjang dan fasilitas pendidikan di pedesaan.
4. meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di industri dan pusat bisnis di kota (Gugler, dalam jurnal sosioHumanika, 1999).

Menurut “ Report of the Nation Committe of Housing “ dalam Astutiek 2001 bahwa jika pertumbuhan penduduk dinegara sedang berkembang diperkirakan 6 % pertambahan pertahun maka pertumbuhan lingkungan perumahan yang merupakan daerah kumuh dapat mencapai 12 % pertahun. Mobilitas penduduk dengan skala yang lebih besar secara teoritis akan memberikan dampak terhadap pengelolaan suatu kota dalam hal ini dapat dilihat beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Perkembangan Penduduk.
Guinsburg , dalam Astutiek,2001, mengatakan bahwa umumnya di Negara yang sedang berkembang seperti Asia dan Afrika tingkat migrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan Negara – Negara maju.
2. Faktor Perkembangan Ekonomi Kota.
3. Faktor Perkembangan Sosial Kota.
Daviss, Gottman and Mc. Gee dalam Astutiek 2001 mngemukakan bahwa perbedaan yang pokok antara urbanisasi di Negara maju dengan Negara sedang berkembang atau dunia ke tiga adalah sejak dimulainya revolusi industri, karena para migran telah terjamin pekerjaannya di sektor informal perkotaan khususnya di jasa industry.
Kota dicirikan sebagai salah satu bentuk pemukiman manusia yang tingkat pemanfaatan ruang yang intensif, maka

secara geografis permukiman dalam pembangunan nya harus memperhatikan interaksi Desa – Kota (Daldjoeni 1998).diskusi tentang lingkungan mencakup dimensi yang lebih luas yakni dimensi sosial, politik dan ekonomi dari dampak proses urbanisasi secara luas yakni dimensi sosial, politik dan ekonomi dari dampak proses urbanisasi yang cepat (Nurmandi, 1999).

Permukiman Kumuh di sekitar Pinggiran sungai dan di sekitar Fasilitas Perekonomian Kota

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan ruang di kawasan pusat kota maka akan terjadi kompetisi penggunaan lahan, yang mana hal ini akan mengakibatkan harga dan nilai lahan di perkotaan cenderung akan meningkat. Dalam kompetisi tersebut kerap penggunaan lahan yang kurang produktif seperti perumahan dan pelayanan umum kalah bersaing dan tergeser oleh penggunaan kegiatan yang lebih produktif. Sejumlah masyarakat migran yang tak sanggup mengantisipasi arus pergeseran ini terpaksa harus membangun perumahan dengan apa adanya pada tanah ilegal di kawasan pusat kota yang sering terkena banjir atau di pinggiran sungai dan pantai. Permasalahan ini menurut Suwarno, 1991 terjadi karena sungai merupakan lokasi termudah dan terbuka untuk pembangunan permukiman golongan masyarakat rendah . kondisi ini didukung pula dengan fungsi sungai yang sangat menunjang bagi kelangsungan hidup, sehingga akan terjadi minimalisasi biaya hidup. Selain itu lingkungan perumahan daerah sungai akan tumbuh tak terkendali dan di huni brata-rata oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Pertumbuhan kegiatan fasilitas perekonomian seperti pusat peetokoan, pusat perdagangan, pembangunan pasar dan pembangunan pelayanan umum lainnya di kawasan pusat kota akan menyebabkan meningkatnya

volume kerja yang berdampak pada tenaga kerja di kota. Kecendrungan masyarakat berpindah ke kawasan perkotaan karena motivasi mencari lapangan kerja yang mana menyebabkan masyarakat tersebut bermukim sedekat mungkin dengan lokasi tempat kerjanya (Pontoh,1994). Maka untuk kebutuhan perumahan masyarakat tersebut menempati tanah tak bertuan disekitar kawasan pusat kota ,dimana disamping dekat dengan tempat kerja juga menghemat biaya transportasi (Andhika, 1997). Menurut Nasution, 1992 Gejala ini menunjukkan bahwa masalah pemukiman tidak hanya menyangkut perbandingan jumlah penduduk yang terus bertambah,akan tetapi juga persaingan dalam mendapatkan lokasi dan telah menjadi kenyataan di kota-kota telah terjadi aglomerasi penduduk dengan berbagai kegiatan perdagangan. Menurut Naing 1999, bahwa adanya perbedaan sewa tanah di kawasan pusat kota disebabkan oleh adanya perbedaan lokasi dan penggunaan tanah dipengaruhi oleh tingkat sewa tanah dan didasari pula pada aksesibilitas.sebagai akibat dari pengaruh lokasi maka menurut Adisasmita, 1994 menekankan bahwa terkonsentrasinya fasilitas ekonomi pada suatu daerah geografis tertentu misalnya daerah-daerah perkotaan akan menciptakan penghematan lokalisasi dan akan meningkatkan pertumbuhan kota tersebut.dapat disimpulkan bahwa fenomena pertumbuhan lingkungan perumahan di kawasan pusat kota yang semakin meningkat terutama di daerah pinggiran sungai yang berada di kawasan pusat kota dan dekat dengan fasilitas perekonomian kota menimbulkan daya tarik tersendiri bagi kaum migran yang datang ke kawasan pusat kota dengan motivasi mencari lapangan pekerjaan. Kondisi ini akan menimbulkan kualitas lingkungan perumahan akan menurun dan terbentuknya permukiman kumuh yang produknnya bertambah dan mengakibatkan

rawan banjir, penularan penyakit, dan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan kriminal pada daerah tersebut. Lingkungan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dimukim oleh kaum migran, menyatu dan karakteristik kehidupan sosialnya hamper sama, dan umumnya tinggal di kawasan pusat kota serta dekat dengan kegiatan tempat kerjanya.

Masalah Perumahan Kota

Kota merupakan pusat pemukiman dan kegiatan penduduk dan sebagai tempat konsentrasi penduduk, maka kota menjadi inovasi semua aspek kota. Menurut Nasir, 1998, bahwa Kota mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting serta dominan dalam kehidupan masyarakat. Penting fungsinya karena kota merupakan wadah konsentrasi pemukiman penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Makin besar suatu kota maka permasalahan perkotaan yang dihadapi adalah :

1. Tingkat urbanisasi dan tingkat pertumbuhan penduduk relative tinggi.
2. Keterbatasan lahan perkotaan menunjang pertumbuhan dan kegiatan di daerah perkotaan.
3. Kondisi permukiman yang kurang memadai/terdapatnya daerah kumuh.
4. Keterbatasan Pemerintah kota untuk pelayananan perkotaan.
5. Koordinasi dalam pembangunan di daerah perkotaan sifatnya dimensional dan multi sektoral / instansional.

Dengan datangnya kaum migran dengan dalih kekerabatan maka akan bertambah lagi perumahan dengan kondisi apa adanya. Hal ini berlangsung terus menerus sehingga satu lokasi perumahan dalam kota yang illegal akan terbentuk suatu lingkungan perumahan yang dapat dikategorikan tidak layak huni. Naing, 1999, tentang *Agglomerasi* mengatakan bahwa pertumbuhan tidak terjadi pada segala

wilayah akan tetapi hanya terbatas pada beberapa tempat saja. Gejala pertumbuhan semakin meningkat sehingga kualitas dan keadaan lingkungan perumahan menurun dan terbentuk apa adanya serta tidak layak huni, dimana hal ini akan terjadi di kawasan pusat suatu kota. Bentuk lingkungan perumahan merupakan manifestasi dari nilai sosial dan budaya masyarakat penghuninya sangat spesifik dan merupakan produk dari kompleks gagasan suatu budaya pemukim. Hal ini sejalan dengan paradigma bahwa dalam suatu pemukiman pembangunan lingkungan perumahan di kawasan perkotaan merupakan bagian integral dan kehidupan keluarga yang dapat meningkat dan berkembang, serta tumbuh sesuai dengan kondisi sumber daya, budaya serta pandangan atas kebutuhan serta persepsinya. Untuk hubungan sosial budaya manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial budayanya cenderung memilih lokasi pemukiman dekat dengan kerabatnya baik tetangga, keluarga agar kontak sosial dapat terus berlangsung. Adanya interaksi sosial ini semakin kuat dan berorientasi pada individu dengan masyarakat lainnya pada daerah sesama asalnya dengan budaya memberi peluang pada kerabat sekampung untuk datang bermukim di daerah perkotaan dengan modal keterampilan yang sangat rendah. Keadaan ini cenderung menyebabkan masyarakat tersebut akan mempunyai kehidupan yang berkelompok di suatu tempat tertentu dalam kawasan pusat kota (Mulyati, Astutiek, 1996). Pendapat Yunus, 2000, yang mengatakan bahwa kebanyakan kota-kota besar tidak tumbuh dalam ruang yang sederhana hanya ditandai oleh suatu pusat kegiatan saja namun terbentuk oleh suatu produk perkembangan dan integrasi berlanjut terus dengan sejumlah pusat-pusat kegiatan yang terpisah. Dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab Aglomerasi yaitu :

1. *Specialized Facilities* (Fasilitas Khusus)

Faktor tersebut merupakan kegiatan tertentu membutuhkan fasilitas tertentu sebagai contoh daerah-daerah pengecer / *retail districts* dalam kegiatannya sangat membutuhkan aksesibilitas yang maksimal.

2. *External Economics (Ekonomi Eksternal)*
3. *Adanya pengelompokan fungsi-fungsi sejenis yang menimbulkan keuntungan tersendiri.*
4. *Faktor saling merugikan antar fungsi*
5. *Antagonisme antara pengembangan pabrik-pabrik dan pengembangan permukiman kelas tinggi yang merupakan suatu contoh.*
6. *Faktor ekonomi dengan fungsi yang berbeda*
7. *Terjadinya fungsi tertentu justru tidak menempati lokasi yang sebenarnya ideal dan ketidak mampuan ekonomi sebagai contoh perumahan untuk kelas rendah tidak mampu menempati lahan yang nyaman karena mahalnya sewa lahan pada suatu lokasi.*

Kebijakan Lingkungan Perumahan

Rumah atau perumahan dalam kehidupan manusia meliputi beberapa fungsi yaitu :

1. Rumah merupakan tempat tinggal dimana orang bermukim disuatu tempat, secara fisik dikatakan bertempat tinggal apabila pemukim telah menemukan keadaan yang cocok baginya serta mempunyai peralatan yang dibutuhkan untuk bertempat tinggal dalam suasana ketenangan.
2. Bahwa perumahan merupakan media antar manusia untuk memperoleh kedamaian dunia dan saat masuk kedalam rumah dan tinggal dalam suasana ketenangan.

Perumahan merupakan media antar manusia guna menentukan kekuatan dan kesegaran , dan dalam rumah pula manusia mendapatkan pendidikan dan pembentukan mental sebagai penghayatan kehidupan

budayanya, Karena rumah mengandung simbol status sosial maka perumahan merupakan masalah yang hamper seumur peradaban manusia.

Hasil pembahasan secara teoritis terdahulu tampak bahwa masalah perumahan sebenarnya bukan monopoli masalah pada Negara yang sedang berkembang, karena perumahan sendiri merupakan bagian terpenting dari kebutuhan setiap orang. Pembangunan lingkungan perumahan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dari lingkungan kehidupan manusia yang mana perlu memperhatikan situasi lingkungan perumahan , mental, dan perekonomian. Tingkat pertumbuhan perumahan diakibatkan kondisi sosial budaya pemukimnya bila ditinjau dari segi lokasi atau tempat kerja dan atau status tanah , perumahan liar dapat diidentifikasi bahwa perkampungan ilegal dibangun berlokasi dipinggiran kota dan kadang tidak jelas status hokum tanahnya. Aspek kebijakan perumahan dan pemukiman landasan undang-undang dan aturan yang digunakan pada undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman disebutkan tentang pengertian dasar istilah perumahan dan permukiman, lingkungan perumahan yang dimaksud adalah sebagai kelompok yang memiliki fungsi dimana lingkungan tempat hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sedangkan permukiman merupakan bagian dari lingkungan diluar kawasan baik dalam lingkup ruang perkotaan maupun pedesaan dan juga memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat hunian serta tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang lingkungan hidup memfokuskan kepada kewajiban pemerintah untuk memantau / mengontrol pengelolaan lingkungan perumahan. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok –pokok pemerintahan

didaerah memberikan landasan bagi pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman yang pada hakekatnya sangat kompleks dan bersifat multidimensional serta multisektoral perlu ditangani secara terpadu melalui koordinasi yang berjenjang di setiap tingkat pemerintahan serta sesuai dengan tata ruang yang ada. Koester, 1995 mengemukakan bahwa tujuan dan sasaran perumahan dan permukiman ditata dalam suatu perencanaan yang sesuai dengan kondisi ruang dan tata guna tanah disertai dengan sarana dan prasarana fasilitas lingkungan yang berfungsi bagi kehidupan sosial masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan lingkungan perumahan harus disesuaikan dengan fungsi sebenarnya dari perumahan serta lingkungannya, disamping itu harus jelas status lokasi pembangunannya, jika hal ini tidak jelas maka banyak lingkungan perumahan yang tumbuh secara ilegal di tanah perkotaan.

Karakteristik Perjalanan ketempat Kerja

Istilah aksesibilitas banyak digunakan dalam studi perkotaan dan analisis pasar. Studi aksesibilitas dalam manajemen perkotaan dihitung berdasarkan waktu dan jarak yang dibutuhkan seseorang dalam menempuh perjalanan antara tempat-tempat dimana mereka tinggal dan dimana fungsi – fungsi fasilitas berada.

Masalah Aksesibilitas diperkotaan saat ini telah menjadi topik khusus dalam kaitannya dengan perencanaan lingkungan dan kebijakan perkotaan di Indonesia. Akses penduduk terhadap lokasi dan berkaitan erat dengan teori spasial kota, secara spesifik beberapa tujuan yang ingin dicapai adalah identifikasi kinerja dan kecenderungan pola akses ditinjau dari distribusi penduduk. Unsure-unsur lain yang berkaitan adalah profil pegawai negeri sipil ataupun pegawai swasta tetap menggunakan transportasi

angkutan umum kota untuk dapat menuju lokasi tempat kerja

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di kawasan pusat kota Palu tepatnya di kelurahan ujuna (RW 04), kelurahan Tatura Selatan (RW 03) dan kelurahan Besusu Barat (RW 09) dengan dasar pertimbangan letak kelurahan dan tingkat kepadatan penduduk yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemukim yang terdapat di ada di bantaran sugai Palu yang diambil dari jumlah rumah dengan pertimbangan dekat dengan kawasan pusat kota Palu. Sampel yang diambil sebanyak 15 % dari jumlah populasi yang ada.

Jenis data didapatkan dari hasil survey langsung di objek penelitian yang merupakan data primer dari responden yang ada, sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumentasi data yang ada pada instansi terkait.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan ; teknik survei lapangan langsung ke objek penelitian dan teknik wawancara kepada responden baik secara terstruktur melalui kuisioner maupun secara tidak terstruktur.

Analisis data dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif yang didukung oleh data-data kuantitatif guna menjawab dan menyelesaikan rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Kegiatan Fasilitas Ekonomi Kota Terhadap Lingkungan Perumahan Daerah Bantaran Sungai.

1. Aspek Kronologis pertumbuhan lingkungan perumahan pada daerah Bantaran sungai Palu.

Tumbuhnya lingkungan perumahan di daerah bantaran sungai Palu disebabkan

karena adanya proses urbanisasi dimana faktor etnis masyarakat pendatang sangat mempengaruhi pertumbuhan perumahan yang sangat bervariasi terkait dengan histori wilayahnya seperti di kelurahan Besusu Barat sebagian besar suku Kaili asli dimana pemilikan lahan diperoleh secara turun temurun dan di kelurahan Tatura Selatan dimana suku Toraja yang datang sekitar tahun 1974 ke kota Palu dengan tujuan mencari lapangan pekerjaan sedangkan untuk di kelurahan Ujuna yang didominasi suku Bugis – Makassar dan Jawa tujuan utama adalah membuat lapangan pekerjaan di bidang sektor informal berkembang perumahan akibat ajakan keluarga yang sudah sukses meniti lapangan pekerjaan tersebut. Kaum migran ini pindah ke Palu dengan harapan ingin mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut menurut Nurmandi 1999, bahwa aspek lingkungan perkotaan mencakup dimensi yang sangat luas, termasuk didalamnya aspek ekonomi sebagai motivasi untuk bermigrasi, khususnya respon terhadap harapan tentang penghasilan lebih baik yang dapat diperoleh dibanding dengan yang diterima di daerah asal. Temuan penelitian Suroso, 1998 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang bermigrasi ke Palu karena alasan mencari pekerjaan. Dapat dibuktikan hal tersebut diatas dengan perkembangan penduduk pada periode-periode bermukim yaitu :

- a. Tahun 1901-tahun 1952, diperkirakan hanya beberapa rumah saja hanya berkisar 2 % keberadaan lingkungannya karena pada saat ini belum terjangkau dengan transportasi umum masih menggunakan kendaraan tradisional.
- b. Tahun 1952 – tahun, pertumbuhan lingkungan perumahan sekitar 15 % dari yang sudah ada (RUTRK, 1996) pertumbuhan ini hanya terjadi pada kelurahan Ujuna saja sedangkan kelurahan lainnya belum terjadi pertumbuhan

perumahan bahkan belum terlihat adanya perumahan hanya rumah singgah untuk tambang pasir. Hanya pada tahun 1963 palu masih terdiri dari Palu Timur dan Palu Barat yang dihubungkan oleh Jembatan darurat yang terbuat dari batang kelapa. Seluruh kegiatan pada waktu itu masih dipusatkan di kota Donggala.

- c. Tahun 1964 – tahun 1973, Dalam kurun waktu ini pertumbuhan mencapai 30 % pertumbuhan mulai terjadi di kelurahan Besusu Barat dan kelurahan Tatura Selatan dimana kelurahan Ujuna semakin pesat juga pertumbuhannya. Penggunaan jembatan darurat yang menghubungkan Palu Timur dan Palu Barat semakin lancar dengan kendaraan tradisional yang lewat meski demikian juga ada kendaraan pribadi yang lewat tetapi penggunaan jembatan penghubung yang terbuat dari batang kelapa ini penggunaannya diatur per jam kendaraan yang lewat.
- d. Tahun 1973 – tahun 1978, pada tahun 1975 pertumbuhan rumah tinggal di Bantaran Sungai Palu sudah terlihat 50 % dari pada pembangunan jembatan penghubung secara permanen, dimana sirkulasi kendaraan di kawasan kota Palu mulai membaik.
- e. Tahun 1978 – 1994, pertumbuhan perumahan di daerah Bantaran Sungai Palu mulai terlihat sekitar 60 % - 70 % , pertumbuhan ini terjadi dikarenakan kota Palu saat itu menjadi pusat perdagangan antar propinsi dan Sulawesi tengah menjadi kota penghubung secara Regional se Sulawesi. Disamping itu sudah diresmikan menjadi ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah. Pada saat ini pula kecamatan telah berkembang menjadi 4 kecamatan dan dibangunnya lagi 2 buah jembatan penghubung.
- f. Tahun 1994 – tahun 2000, pada saat ini sudah sangat pesat dimana pada era 70 an kawasan pusat kota yang tadinya kawasan

rumah sakit umum di rubah fungsinya menjadi kawasan perdagangan atau pusat pertokoan dan pada kurun waktu ini ditetapkan Kota Palu sebagai Kotamadya yang berdiri sendiri maka bertambahlah kepesatan penduduk yang berasal dari luar Kota Palu baik antar kabupaten maupun secara regional.

- g. Tahun 2000 – tahun 2006, kurun waktu ini sudah terjadi pemekaran yang pesat baik dibidang pembangunan fisik kota maupun peremajaan-peremajaan lingkungan termasuk peremajaan lingkungan kelurahan ujuna di daerah bantaran sungai tetapi masih terlihat juga kekumuhan karena peremajaan tidak belum secara keseluruhan dimana Nampak rusun dibangun tetapi hasil survey masih banyak masyarakat yang enggan tinggal di rusun masih lebih senang membangun rumah

tinggal secara pribadi dan seadanya, hal ini harus di cari akar permasalahannya kenapa harus demikian mungkin sewa rumah yang belum terjangkau oleh beberapa masyarakat atau karena budaya kehidupan mereka yang tidak dapat dipisahkan dengan kondisi lapangan yang ada.

- h. Selain aspek tersebut diatas maka pertumbuhan pemukiman di bantaran sungai Palu dapat ditinjau dari aspek kronologisnya, dimana indicator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

✓ **Lama bermukim**

Lama bermukim mesyarakat yang ada di daerah Bantaran sungai Palu menjadi salah satu indikator tingkat pertumbuhan perumahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan Perumahan

Lama Bermukim	N	%
0 tahun sampai 5 tahun	39	26
6 tahun sampai 10 tahun	30	20
11 tahun sampai 15 tahun	30	20
Diatas 15 tahun	51	34
Jumlah responden	150	100

Sumber : Analisis data Lapangan 2006

Nampak dari hasil analisis bahwa yang terbanyak menempati daerah tersebut untuk indicator lama bermukim diatas 15 tahun jika temuan ini dikaitkan dengan pertumbuhan perumahan maka umumnya sejak 1984 penduduk migran telah menempati lokasi bantaran sungai tersebut dan terus berkembang sampai sekarang. Perkembangan ini diakibatkan memanggil kerabat, sanak saudara sekampung untuk membantu usaha sektor informal dengan menjanjikan lapangan pekerjaan. Hal ini yang membuat daya tarik yang kuat dimana sarana dan prasarana perkotaan semakin membaik

- ✓ Daerah asal dan alasan datang ke kota Palu.

Dari 45 responden yang berasal dari kota Palu, umunya mereka dari masyarakat kaili yang asal mulanya memiliki tanah warisan sekitar lokasi perdagangan saat ini sedangkan penduduk migran dari luar kota Palu sebesar 90 % dari dari Sulawesi Selatan yang terdiri dari suku bugis, suku Makassar dan suku Toraja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar atau sekitar 82 % responden mengatakan alasan datang hanya untuk mencari pekerjaan, terutama bergelut di bidang sektor informal kota

yang tidak memerlukan modal pendidikan dan tidak memerlukan ketrampilan khusus. Temuan penelitian tersebut sesuai yang dikemukakan Tadaro dan Stikid (1983) yang menyatakan bahwa sektor informal kota merupakan manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja karena mereka memasuki kegiatan yang berskala kecil yang lebih bertujuan untuk mencari kesempatan kerja di banding keuntungan.

Selain itu tanpa modal pun para migran dapat bekerja sehingga memberi peluang untuk menempati lahan ilegal di perkotaan, selain itu hasil wawancara para responden disamping mencari lapangan pekerjaan juga pada umumnya berasal dari daerah yang sama (sekampung) dengan masyarakat yang telah lama bermukim di tempat tersebut.

Tabel 2. Alasan Penduduk Pindah Ke Kota

No	Daerah Asal	Alasan Pindah Ke kota				
		Cari kerja	Ikut Kel	Ikut teman	Jml	%
1	Sekitar Kota Palu	20	15	10	45	30
2	Di luar Kota Palu	62	33	10	103	70
Jumlah		82	48	20	150	100

Sumber : Analisis data Lapangan 2006

2. Analisis Lokasi Kegiatan Fasilitas Ekonomi Perkotaan Terhadap Lokasi tempat Tinggal Pemukim di Bantaran Sungai Palu.

Salah satu daya tarik migran datang dan bermukim di daerah Bantaran Sungai Palu adalah Indikator lokasi tempat tinggal dan tersedianya fasilitas ekonomi dalam kota. Indikator ini telah diungkapkan dalam kajian teoritis bahwa antara tempat tinggal, pusat perdagangan dan pelayanan serta kemudahan mendapatkan air minum dan tempat kerja menjadi alasan tersendiri kaum migran untuk tetap tinggal di daerah Bantaran sungai

(Herlianto, 1991 dan Pontoh, 1994 dan Nasution, 1992). Faktor ini yang menyebabkan efisiensi responden dalam mencapai lokasi tempat kerjanya di kawasan pusat kota sedangkan masyarakat pemukim di kelurahan tatura selatan juga mempunyai tempat kerja di pusat kota bagian selatan Palu dekat dengan huniannya di Bantaran Sungai juga. Guna mendapatkan gambaran jarak tempat tinggal dengan tempat kerjanya dapat dilihat pada hasil pengamatan di lapangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Jarak hunian dan Tempat Kerja

Jarak Hunian	N	%
0 meter sampai 100 meter	95	63,33
100 meter sampai 500 meter	25	16,67
500 meter sampai 1.000 meter	-	-
➤ Dari 1.000 meter	30	20
Jumlah	150	100

Sumber : Analisis data Lapangan 2006

Pada tabel tersebut Nampak bahwa 63,33 % responden mempunyai jarak hunian terdekat ke kawasan pusat kota Palu 16,67 % yang menjangkau 100 meter sampai 500 meter untuk jarak 500 meter masih terasa dekat dan dapat dijangkau dengan jalan kaki dan 20 % yang lebih dari jarak 1 Km ini hanya terdapat dikelurahan Tatura Selatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari pemukim tersebut tinggal di kawasan pusat kota Palu dan umunya bekerja

di pusat perdagangan yang ada di pusat kota Palu dimana jenis pekerjaan yang digeluti di sektor informal kota dan selain itu hanya 13 % yang bekerja di lokasi hunian, membuka warung dan penambang pasir disekitar lokasi hunian. Adapun deskripsi jarak hunian dengan lokasi tempat kerja dapat ditunjukkan dengan hasil tabulasi silang sebagai berikut :

Tabel 4. Tabulasi Silang Jarak Hunian dan Tempat Kerja

Jarak hunian ke tempat kerja	Lokasi Tempat Kerja									
	Pedagang keliling		Sekitar hunian		Pusat perdagangan		lainnya		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
0 meter – 100 meter	-	-	22	14,6	28	18,7	-	-	50	34
101 meter – 500 meter	-	-	-	-	20	13,3	-	-	20	13
500 meter – 1.000 meter	12	8	-	-	12	8	-	-	40	27
➤ Dari 1.000 meter	19	16,6	-	-	13	8,6	8	12	40	26
Jumlah	37	24,6	22	14,6	73	48,6	18	12	150	100

Sumber : Analisis data Lapangan 2006

Dari hasil tabulasi silang tersebut diatas maka diperoleh gambaran bahwa 48,67 % penduduk mempunyai tempat kerja dikawasan pusat perdagangan yang terletak di kawasan pusat kota sedangkan pedagang keliling dengan mengandalkan gerobak dorong sebesar 24,66% dan yang berkeliling sekitar hunian dan fasilitas perdagangan sebesar 12 % dan pedagang yang berkeliling di luar kawasan hunian sebesar 8 %. Responden yang membuka usaha sendiri dan tempat kerjanya di kawasan hunian bantaran sungai sebesar 14,67 % dan 12 % sebagai pegawai swasta , PNS dan lainnya. Dari hasil wawancara yang tidak terstruktur pemukim yang telah bermukim selama 15 tahun rata-rata berjualan di kawasan pusat pertokoan dan kawasan perdagangan yang ada di Kota Palu. Jika temuan penelitian ini dihubungkan dengan pendapat Hamid,1994 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang cukup tinggi antara mobilitas tempat usaha

dengan mobilitas tempat hunian dimana tempat tinggal para pelaku sektor informal senantiasa mengikuti tempat usahanya.

3. Analisis ketersediaan transportasi dan sirkulasi terhadap pertumbuhan lingkungan perumahan di daerah bantaran sungai.

Transportasi merupakan salah satu kegiatan penting di kawasan pusat kota karena sangat berkaitan dengan kebutuhan orang yang bermukim dikawasan pusat kota tersebut. Transportasi merupakan kebutuhan responden untuk mencapai lokasi dimana tempat kerja dan sebaliknya. Sirkulasi angkutan umum mempunyai peranan penting bagi pemukim di bantaran sungai palu. Untuk mengetahui hubungan moda angkutan dengan tempat kerja migran adalah sebagai berikut :

abel 5. Moda Angkutan dan Tempat Kerja

Moda Angkutan yg digunakan	N	%
1. Jalan Kaki	116	77,33
2. Sepeda	5	3,33
3. Sepeda Motor	4	2,67
4. Angkutan Umum	13	8,67
5. Dokar	12	8
Jumlah seluruhnya	150	100

Sumber : Analisis data Lapangan 2006

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat 77,33 % responden yang hanya berjalan kaki menuju ke lokasi tempat kerja sedangkan yang menggunakan angkutan umum 8,67 %, temuan penelitian ini sesuai dengan pendapat Alfred Weber 1909, bahwa aspek yang sangat penting adalah biaya transportasi sebagai faktor pertimbangan lokasi, asumsi teorinya menekankan dua kekuatan lokasional primer yaitu orientasi transportasi dan orientasi tenaga kerja. Demikian juga pendapat Bourne 1971 dalam Andhikaa, 1997, bahwa suatu pemukiman kota dapat memanfaatkan daerah yang tak bertuan dipertokoan oleh warga kota (para migran) disamping itu dekat ke tempat kerja juga untuk menghemat biaya transportasi. Lokasi masyarakat yang mempunyai tempat kerja di lokasi pemukimannya adalah penambang pasir dimana mengkonsumsi

bahan bangunan ke kawasan pusat kota dengan menggunakan truk dan kendaraan tradisional gerobak sapi. Kondisi ini hanya terjadi di kelurahan ujuna dan kelurahan Tatura Selatan. Bahan bangunan tersebut sebagian kecil juga digunakan oleh masyarakat sekitar untuk pembuatan Batako.

B. Pengaruh Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya terhadap Pertumbuhan Lingkungan Perumahan di Bantaran Sungai Palu

1. *Pertumbuhan lingkungan perumahan ditinjau dari aspek sosial ekonomi masyarakat pemukim daerah Bantaran Sungai Palu.*

Perumahan di bantaran sungai Palu erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Besarnya Pendapatan Masyarakat pada Perumahan Bantaran Sungai

BESARNYA PENDAPATAN	N	%
< dari Rp. 100.000,-	23	15,33
Rp. 100.000, - Rp. 150.000,-	46	30,67
Rp. 150.000,- - Rp. 300.000,-	47	31,34
Rp. 300.000,- - Rp. 650.000,-	34	22,66
Jumlah keseluruhan	150	100

Sumber : Analisis data Lapangan 2006

Dari hasil tabulasi tersebut diatas bahwa rata-rata pemukim mempunyai keluarga yang cukup banyak sehingga pendapatan sehingga dapat diprediksi bahwa sekitar 17 % saja dapat dikatakan hidup layak meskipun mereka merupakan komunitas masyarakat

berpenghasilan rendah tetapi secara sosial ekonomi mereka cenderung homogeny, akan tetapi sebagian masyarakat bertumpu pada ekonomi informal. Faktor sosial ekonomi ini pula menyebabkan berubahnya fungsi ruang rumah tinggal dan lingkungan perumahan

menjadi tempat usaha untuk mencari nafkah sebagai wujud dan aksesibilitas yang mencerminkan adanya hubungan erat antara pemukim dan lingkungannya.

2. *Tinjauan pola pertumbuhan lingkungan perumahan daerah Bantaran Sungai Palu terhadap aspek sosial budaya pemukim.*

Variasi penyebab terbentuknya lingkungan perumahan di daerah bantaran sungai disebabkan pula oleh pola kegiatan yang dilakukan pemukim dimana faktor sosial budaya merupakan hal yang dominan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan yang tidak dapat dihindari antar sesama pemukim yang menjadi salah satu karakteristik yang menjadi ciri khas utama pada masyarakat pemukim di daerah bantaran sungai Palu. Pola pertumbuhan lingkungan perumahan tersebut sangat erat dengan bentuk lingkungan perumahannya yang merupakan

nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang mempunyai spesifikasi tersendiri. Masyarakat pemukim dibantaran sungai terdiri dari berbagai etnis dan budaya yang berbeda di tiap lokasi penelitian, hasil pengamatan di tiga lokasi menunjukkan bahwa suku Toraja interaksi sosialnya terjadi bila ada acara ritual keagamaan, suku Bugis Makassar yang ada di Kelurahan Ujuna

3. *Tinjauan sosial ekonomi pemukim terhadap karakteristik fisik lingkungan perumahan daerah Bantaran sungai Palu.*

Pertumbuhan lingkungan perumahan jika ditinjau dari segi aspek sosioekonomi pemukim terhadap karakteristik lingkungan pemukiman dapat dikaitkan dengan lama tinggal dan tahun pembangunan pertokoan sekitar lokasi hunian masyarakat yang bermukim di daerah bantaran sungai Palu.

Tabel 7 lama bermukim dan tahun pembangunan pertokoan di pusat kota

Lama bermukim	Tahun Pembangunan Toko							
	< tahun 1988		< tahun 1990		< tahun 2003		< Tahun 2007	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0 – 5 Tahun	5	3,3	10	6,7	13	8,6	28	19
6 – 11 tahun	12	8	12	8	15	10	39	26
12 – 17 Tahun	14	9,3	13	8,6	14	9,3	41	27
>18 Tahun	11	7,3	15	10	16	10,6	42	28
Jumlah	42	28	50	33,3	58	38,6	150	100

Sumber : Analisis data Lapangan 2006

Hasil tabulasi silang tersebut menunjukkan bahwa tahun pembangunan pertokoan > tahun 1990 kian terlihat meningkat sampai dengan 100 % dan lama bermukim sangat berpengaruh pada tahun pembangunan fasilitas pertokoan di kawasan pusat kota (sesuai wawancara tidak terstruktur).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin lama migran bermukim maka akan semakin bertumbuh lingkungan perumahan di bantaran sungai Palu seiring dengan semakin

meningkatnya fasilitas pertokoan yang ada di kawasan pusat kota. Hal ini dapat pula dilihat kaitannya dengan kondisi fisik rumah tinggal yang mana kaitannya dengan pendapatan pemukim melalui tabel dibawah ini.

Tabel 8. Kondisi Fisik rumah tinggal Responden

Kondisi Fisik Rumah Tinggal	N	%
Kondisi Darurat	57	38
Kondisi Semi Permanen	45	30
Kondisi Permanen	48	32
Jumlah	150	100

Sumber : Analisis data Lapangan 2006

Tabel tersebut menunjukkan bahwa lingkungan perumahan di daerah bantaran sungai dengan kondisi darurat lebih tinggi persentasenya, hal ini dapat dilihat lagi pada

tabel yang berkaitan dengan pendapatan pemukim.

Tabel 9. Hubungan Pendapatan dengan kondisi fisik rumah tinggal

Pendapatan Pemukim	Kondisi Fisik Rumah Tinggal							
	Darurat		Semi Permanen		permanen		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1. < Rp.200.000,-	27	18	10	6,6	-	-	37	24,5
2. Rp.200.000 – Rp.350.000,-	12	8	12	8	5	3,3	29	19,3
3. Rp.350.000 – Rp.500.000,-	13	8,6	13	8,6	20	13,3	46	30,6
4. > Rp. 500.000,-	5	3,3	10	6,6	23	15,3	38	25,3
JUMLAH	57	38	45	30	48	31	150	100

Sumber : Analisis data Lapangan 2006

Dari hasil tabulasi silang tersebut di atas menunjukkan bahwa lingkungan perumahan dengan kondisi darurat jelas dengan penghasilan yang kecil hal ini ditunjang karena beberapa rumah tangga menghuni satu rumah tinggal, sehingga pengeluaran untuk kebutuhan hidup meningkat. Akan tetapi awalnya semua kondisi rumah di daerah tersebut kondisinya darurat. Setelah pemukim agak meningkat pendapatannya maka kondisi fisik rumah tinggal berubah menjadi semi permanen dan permanen. menurut Astutiek, (2000 : 21) bahwa sejak tahun 1950 an terjadi proses migrasi yang cukup besar dengan alasan :

- Mencari lapangan pekerjaan
- Arus pelajar dan mahasiswa dari kabupaten sekitar untuk mengejar pendidikan di Kota Palu

Akibat alasan tersebut di atas maka tumbuhlah rumah –rumah liar dimana

kemampuan untuk memiliki lahan dan menyewa rumah permanen sangat mahal harganya, tapi saat ini telah dibangun rusun sewa akan tetapi kondisi pendapatan juga masih ada yang tidak menunjang untuk menyewa sarana tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Temuan masalah 1 berdasarkan analisis pada penelitian ini adanya faktor pendorong pertumbuhan lingkungan perumahan disebabkan keberadaan fasilitas perekonomian kota sehingga secara kronologis pada peta pertumbuhan sudah nampak sejak tahun 1990.
2. Temuan rumusan masalah 2 adalah dengan adanya faktor sosial budaya migran menjadi faktor daya tarik

tumbuhnya lingkungan perumahan dibantaran sungai Palu, hal ini disebabkan karena faktor kekerabatan, lama tinggal, kesamaan etnis dan kegiatan mencari lapangan pekerjaan.

3. Hasil penelitian menunjukkan pada umumnya pemukim bekerja di sektor informal kota.

Saran

Untuk meningkatkan mutu lingkungan perumahan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Palu guna mewujudkan kawasan kotayang lebih baik sesuai dengan fungsinya, maka disarankan :

1. Pemerintah Daerah kota Palu agar menyusun suatu kebijakan tentang penambahan rumah tinggal yang sifatnya liar dimana kebijakan ini sebagai control pertumbuhan lingkungan yang tidak sehat.
2. Agar penataan kawasan pemukiman memperhatikan kualitas sehat, namun saat ini sudah terlihat rusunawa akan tetapi di RW lain masih tetap Nampak pertumbuhan perumahan secara liar.
3. Agar memperhatikan daerah hijau untuk kawasan sungai sebagai green city kota.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adisasmita,R, 1994, Berapa Dimensi Ekonomi Regional, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin Makassar
2. Andhika, 1997, Studi Puspensi Lokasi Pemukiman di Kota Denpasar, Majalah Ilmiah Universitas Udayana Bali, Halaman 52-53
3. Astutiek, Mulyati 1997 Pola Interaksi Sosial Pemukim dalam Hubungannya dengan Organisasi Ruang Pemukimannya di Kelurahan Ujuna, Lembaga Penelitian Universitas Tadulako
4. Astutiek, 2000 Tingkat Pertumbuhan Pemukim di Daerah Aliran Sungai ditinjau dari segi sosial budaya masyarakatnya, Majalah Ilmiah MEKTEK volume 2 halama 10-34 edisi mei Fakultas Teknik Universitas Tadulako Palu.
5. Astutiek, 2001 Keterkaitan Migrasi dengan Pola Pemukiman Pelaku Sektor Informal Kota, halaman 1,13,28,30,32, Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Palu.
6. Budiharjo, 1997 Masalah Pemukiman Kota, Penerbit Alumni, Bandung
7. Budiharjo, 1999, Kota Berkelanjutan, halaman 45, Penerbit Alumni Bandung
8. Daldjoeni, 1997, Seluk Beluk Masyarakat Kota, Penerbit Alumni Bandung
9. Daldjoeni, 1999, Geografi Desa Kota, Penerbit Alumni Bandung
10. Hadi Sabari, 2000, Struktur Tata Ruang Kota halaman 44-45 penerbit pustaka pelajar, Jakarta
11. Herlianto, 2000, Interaksi Desa Kota, Penerbit Alumni Bandung
12. Heinz Frick, 2000, Perancangan Kota Secara Terpadu, Penerbit Kanesus Yogyakarta
13. Koester, 1997, Perspektif Lingkungan Desa Kota, penerbit Universitas Indonesia Jakarta
14. Maarif, Usman, 1999, Perilaku Ekonomi Pedagang Warung Tenda, JURNAL sosiohumanika, penerbit Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
15. Naing, 1999, Studi Pemukiman Kumuh dalam mendukung Relokasi di Kawasan Sungai Walanae, Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
16. Numandi, 1999, Manajemen Perkotaan, penerbit lingkaran Bangsa, Yogyakarta.
17. Singarimbun, 2001, Metode Penelitian Survey, Penerbit LP3S Jakarta
18. Sukanto, 2000, Sosiologi Suatu Pengantar, Penerbit PT. Grafindo Persada Jakarta
19. Suparlan, 1999, Struktur Perkotaan dan Kehidupan Liar, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Edisi Januari